



## KONSUMERISME DAN MENINGKATNYA TIMBUNAN SAMPAH DI PROVINSI ACEH DITINJAU DARI FIQH AL-BI'AH

Zulfikar Riza Haris Pohan<sup>1</sup>, Ramli<sup>2</sup>, Anwar<sup>3</sup>, Iin Meriza<sup>4</sup>, Ismail Angkat<sup>5</sup>

<sup>1,5</sup>STIT Hamzah Fansuri Subulussalam, <sup>2,3,4</sup>STAIN Teungku Dirundeng Muelaboh

<sup>1</sup> zulfikariza@mail.ugm.ac.id, <sup>2</sup> ramli@staindirundeng.ac.id, <sup>3</sup> anwar@staindirundeng.ac.id,  
<sup>4</sup> iinmeriza@gmail.com, <sup>5</sup> ismailangkatwew@gmail.com

### Abstrak

Sampah di Provinsi Aceh setiap tahun meningkat, di Kota Banda Aceh saja pada tahun 2023 terdapat 240 ton sampah per hari. Namun, peningkatan sampah tersebut juga terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hal ini terkait dengan dua hal, minimnya regulasi penanganan sampah dan semakin tingginya watak konsumerisme di Aceh. Program JAKSTRADA di Aceh melalui Dinas KLHK pada tahun 2018 telah membentuk PermenLHK, namun demikian hal tersebut belum menemukan hasil yang ideal. Peralunya, penanganan sampah bukan hanya ada pada dinas terkait atau regulasi, melainkan dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Untuk menerapkan sistem kebersihan, di dalam khazanah Islam terdapat fiqh al-Bi'ah (fiqh lingkungan) yang menerapkan kebersihan yang bersumber dari kesadaran untuk meminimalisir sifat konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sampah dalam perspektif yang lebih mendalam pada sifat dan budaya masyarakat dalam mempersepsikan sampah. Sebagai penelitian yang mencoba mencari akar suprastruktural dari permasalahan sampah tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, data-data yang didapatkan dari berbagai temuan media dan analisa mengenai fenomena terkait. Penelitian ini diharapkan menjadi salah-satu sumber rujukan untuk meminimalisir timbunan sampah di Aceh dengan cara pembacaan pada sifat konsumerisme di Aceh.

**Kata Kunci:** Aceh, Perilaku Konsumtif, Sampah, Fiqh al-Bi'ah

### Pendahuluan

Pada pembahasan umum mengenai fiqh, taharah masuk ke dalam bahasan pertama. Taharah adalah konsep mengenai panduan kebersihan dan kesucian, atau tata cara dalam menjaga tubuh manusia dari kotoran. Pun demikian, taharah selalu diasosiasikan sebagai bentuk ritual yang harus disanggupi setiap individu, khususnya ketika sedang akan melaksanakan ibadah. Memang, dalam taharah dianggap bukan persoalan bagaimana menjaga lingkungan dengan pendekatan ekologi yang meniscayakan kesucian secara kolektif (Foltz, Denny and Baharuddin, 2003). Batasan dalam hal literatur klasik Islam mengenai panduan

kebersihan kolektif (ekologi) sangat minim dijumpai dalam bahasan-bahasa fiqh.

Di samping itu, masyarakat Islam saat ini memiliki kecenderungan konsumerisme yang cukup besar. Bahkan, untuk urusan konsumerisme dalam bulan Ramadhan yang mana umat Islam dianjurkan untuk membatasi tabiat konsumernya, justru menjadi bulan yang dipenuhi dengan konsumerisme yang berlebihan. Lonjakan sampah pada bulan Ramadhan justru lebih besar ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Sifat konsumerisme ini menjadi masalah yang kompleks, sebab bukan hanya menjauhkan masyarakat Islam pada pendidikan spiritualitas yang mapan, konsumerisme juga menggiring masyarakat dalam perilaku yang tidak sehat dalam konteks lingkungan hidup.

Untuk melihat minimnya pembahasan ekologis dalam literatur Islam klasik, muncul berbagai literatur fiqh kontemporer yang membahas mengenai konsumerisme dan kebersihan lingkungan. Fiqh al-Bi'ah adalah salah-satu dari pandangan fiqh kontempore yang membahas lingkungan hidup masyarakat Islam. Fiqh al-Bi'ah dalam argumen Yusuf Qardhawi dalam kitab "Riayatu al-Bi'ati fi Syariat Islam" menyebut bahwa kerusakan lingkungan mengancam maqashid syari'ah (Al-Qardawi, 1421). Qardhawi berpadangan bahwa pelestarian lingkungan dapat menjadi jalan terlaksananya kebutuhan agama, pembangunan moral dan pemeliharaan jiwa. Saat ini banyak sekali konflik yang timbul akibat tidak adanya konsep ekologi dalam masyarakat Islam, misalnya seperti konflik lahan, konflik tanah adat, pemukiman liar dan lain sebagainya yang jika ditelusuri benang merahnya bersumber dari minimnya pendekatan ekologi dalam wacana sosial.

Fiqh al-Bi'ah juga menjadi fokus kajian banyak ulama kontemporer lainnya dalam hal pembacaan kembali konsep fiqh mengenai taharah atau kebersihan dalam Islam. Beberapa ulama Islam kontemporer membahas fiqh al-Bi'ah terkait pemanasan global, ada pula mengenai perubahan iklim (Imamah, 2017), penebangan liar dan lain sebagainya. Umat Islam di Indonesia memiliki persentasi kuantitas terbesar, oleh karena itu umat Islam bertanggungjawab dalam hal isu-isu ekologi, beberapa ulama yang langsung memberikan analisa mendalam untuk mencari bentuk-bentuk ekologi seperti Ibrahim Abu Bakar dan Ahmad Syafii yang meneliti Alquran dan Hadis dalam mencari penjelasan mengenai konsep ekologi dalam Islam (Yafie, 2006).

Teori mengenai ekologi tentunya bukan hanya ditetapkan dalam regulasi, namun yang

dibentuk dari ekologi Islam dalam fiqh al-Bi'ah adalah kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Hari ini, pengembangan pengetahuan mengenai pentingnya lingkungan bersih memang telah digalakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, telah banyak sekali gerakan penghijauan dari berbagai pihak. Namun demikian, sangat sedikit sekali diimbangi dengan memberikan pemahaman bahwa konsumerisme adalah hal yang juga turut mengandung benih-benih kerusakan ekologis (Northcott, 2013). Kerusakan ekologi yang dapat ditimbulkan dari sini adalah dengan adanya penumpukan sampah.

Sampah di Provinsi Aceh telah menjurus pada fase yang dapat dianggap sebagai fase menengah, untuk itu penanganannya harus segera dilakukan. Pada data Badan Pusat Statistik Aceh (Badan Pusat Statistik Aceh, 2022), Banda Aceh mendapatkan angka tertinggi penumpukan sampah 252,21 M3. Daerah paling sedikit penumpukan sampah hanyalah Sabang yang hanya 26,29 m3 pada tahun 2022. Selebihnya daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh mencapai ratusan m3 penumpukan sampah pada setiap harinya. Hal ini menjadi sorotan yang cukup mencemaskan, sebab Provinsi Aceh adalah daerah yang memiliki regulasi hukum syariat Islam. Di Banda Aceh, pusat Provinsi Aceh, timbunan sampah pada tahun 2022 dalam amatan Kompas (KOMPAS, 2023) mencapai 88.800 ton per hari, sedangkan dalam catatan DLHK3 menyebut Banda Aceh memproduksi 230 ton sampah perharinya (Antaraneews, 2023). Dilanjutkan lagi bahwa laporan DLHK3 lonjakan sampah biasanya terjadi pada bulan puasa (DLHK Banda Aceh, 2020).

Fenomena di atas memang menjadi bahasan penting dalam ihwal pembahasan mengenai ruang hidup di Provinsi Aceh. Studi ini dilakukan guna menemukan kembali bagaimana bentuk penjelasan yang paling memungkinkan dalam menangani sampah di Provinsi Aceh. Terlebih lagi dengan adanya regulasi syariat Islam, penangan sampah di Aceh harus menjadi pembahasan penting. Penelitian menggunakan pendekatan berbasis pada penelitian literatur yang mencoba menjadikan fiqh al-Bi'ah sebagai bahan analisis, juga melihat bagaimana perkembangan program JAKSRTRADA di Provinsi Aceh. Pengumpulan data bersumber dari berbagai laman media cetak maupun online. Sebagai penelitian yang mencoba membaca kembali isu ekologi di Aceh yang masyhur dengan syariat Islam, penelitian ini juga mengambil teori-teori konsumsi massa sebagai bahan untuk menjelaskan fenomena semakin meningkatnya tumpukan sampah di Aceh.

## **Kerangka Teori**

### **A. Konsumerisme**

Pembahasan konsumerisme adalah pembahasan yang ada pada berbagai lini ilmu sosial. Konsumerisme selalu digambarkan dengan nada yang negatif, seperti yang sama-sekali tidak memberikan substansi positif. Konsumerisme yang dibahas dalam penelitian adalah hal yang terkait dengan pengembangan keperibadian dalam masyarakat Islam. Perilaku konsumtif di dalam Islam seringkali digambarkan dengan kedangkalan spiritual. Namun demikian, konsumerisme tidak hanya persoalan boros dan sikap berlebihan lainnya. Konsumerisme adalah kultur yang dibentuk dari terciptanya masyarakat modern yang dekat dengan kapitalisme (Arnez, 2014).

Kapitalisme menyediakan segalanya secara instan dan dengan sedikit resiko. Oleh karena itu, kapitalisme yang merasuk ke dalam tubuh masyarakat Islam di Aceh menyebabkan melonjaknya konsumsi publik yang berlebihan. Hal ini dapat dilihat dengan bergesernya masyarakat Aceh yang tradisional ke arah yang lebih modern lagi. Pasca-tsunami kapitalisme di Aceh semakin berkembang dengan adanya berbagai bisnis retail raksasa, makanan cepat saji dan berbagai mode busana yang beragam. Hal tersebut tak ayal menjadi masalah baru yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Aceh. Pada satu sisi pertumbuhan ekonomi di Aceh tampak sangat kontras dengan masyarakat Aceh pra-tsunami (Pohan, 2021). Daerah perkotaan di Aceh seperti Banda Aceh misalnya, yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Konsumerisme dan kapitalisme adalah dua hal berjalan secara beriringan, tidak parsial. Pada sisi lain, perubahan tersebut membawa masyarakat Aceh semakin individualis, sebab individualisme lebih menguntungkan jika dalam lingkungan yang menjanjikan kenyamanan hidup yang serba instan.

### **B. Lingkungan Hidup dan Efek Kapitalisme**

Isu mengenai lingkungan hidup umumnya menjadi perhatian warga dunia. WHO (World Health Organization) memberikan penjelasan isu lingkungan yang menjadi konsen dalam setiap pengelolaan negara, yang adalah penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan pencemaran tanah. Ketiga hal tersebut adalah hal yang bisa didapatkan pada berbagai daerah di

Aceh. Minimnya pengelolaan air bersih yang mumpuni, penanggulangan limbah yang belum sepenuhnya berhasil dan pencemaran tanah melalui kuantitas sampah yang cukup banyak. Dampak yang terjadi jika ketiga hal tersebut tidak ditanggulangi, menurut Northcott (Northcott, 2013) menjadi tanda akan terjadinya kecacatan ekologis yang bermula dari perubahan iklim yang tidak stabil.

Perubahan iklim yang terjadi muncul dari semakin meluasnya ekspansi kapitalisme di hutan-hutan provinsi Aceh, pun ditambah lagi limbah pabrik yang mencemari tanah dan sungai. Apabila ketidakseimbangan antara hutan dan pemukiman, atau hutan dengan perkubunan dan pabrik maka muncul kecendrungan matinya microclimate yang berfungsi mengatur iklim, seperti hujan, temperatur dan intensitas cahaya matahari.

### **C. Fiqh Lingkungan**

Perhatian pada aspek-aspek ekologi dalam tulisan para fuqaha Islam klasik dapat dikatakan sangatlah minim. Ada berbagai sebab, salah-satunya adalah karena persoalan krisis lingkungan seperti yang kita hadapi saat ini, tidak benar-benar terjadi di masa lalu. Belum ada industri di Baghdad, Mesir Syam dan Andalusia di masa lalu maka para fuqaha tidak membahas hal tersebut (Yafie, 2006). Kendati demikian, bahasan Islam mengenai pengelolaan lingkungan yang baik masih tetap ada, dan hal itu melandasi fuqaha kontemporer menrangkai bentuk fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah). Pun demikian, fuqaha klasik juga menyumbangkan doktrin-doktrin fiqh untuk menjadi metodologi dalam merumuskan konsep dalam etika kebersihan lingkungan yang sesuai kaidah-kaidah Islam.

Munculnya fiqh lingkungan bedasar pada problem lingkungan yang disebabkan mula sekali pada saat revolusi industri awal abad ke-19. Saat ini, fiqh diperluas dengan dasar daripada Alquran dan Hadis. Pembahasan yang diadopsi ke dalam fiqh al-bi'ah adalah dalam hal kebahasaan mengadopsi fiqh taharah), dalam simbol mengambil sisi dari fiqh nazafah dan semangat pembentukan berdasar pada sistem maqashid syariah, ketiga hal ini menjadi dasar dari pembentukan fiqh lingkungan (Safrihsyah and Fitriani, 2014).

### **Metodologi Penelitian**

Studi mengenai tinjauan fiqh al-bi'ah ini memakai metode kualitatif dan dengan

melakukan penjelasan deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk coba memahami kembali fenomena yang terjadi terkait bagaimana persepsi dan kesadaran yang muncul dari subjek dalam hal konsumerisme dan hubungannya dengan penumpukan sampah. Penjelasan dari penelitian ini pun dengan melakukan alur holistik dan ilmiah (Zed, 2004). Digunakannya metode deskriptif kualitatif dalam upaya sebagai bentuk yang dirasa paling memungkinkan dalam mengukur keadaan atau melihat fenomena yang terjadi terkait tema penelitian. Di sisi lain, metode deskriptif dimaksudkan untuk melihat tinjauan secara objektif. Terkait hal tersebut, subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Aceh pada umumnya. Subjek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini merupakan ihwal informasi yang dapat ditangkap oleh peneliti.

Data-data lain yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah media massa dan berbagai hasil laporan resmi dari dinas-dinas terkait di Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi (Titscher, 2009). Dokumentasi adalah pengumpulan informasi melalui tulisan, arsip, buku, dan lainnya. Dokumentasi memiliki posisi yang sangat penting dalam penelitian ini, karena itu pemilahan dokumentasi juga dilakukan dengan standar waktu terbit, keabsahan informasi, dan hasil laporan atau jurnalisme yang dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2012). Maka dalam pengujian keabsahan dokumen, dilakukan observasi bentuk dokumen sebagai salah-satu metode dalam melakukan pengumpulan informasi mengenai objek penelitian yang dapat dideteksi kebenarannya.

## **Pembahasan**

Pada tahun 2010-2012, sektor industri semakin membludak di Indonesia dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi. Sektor pertambangan dan migas saja menyumbangkan 30% pendapatan negara. Untuk Aceh, industri besar dan sedang dalam data BPS Aceh telah ada sejak tahun 1998, sampai tahun 2019 tercatat bahwa industri besar di Aceh bertambah setiap tahunnya sebesar 20% setiap tahun (Badan Pusat Statistik Aceh, 2020). Dalam rilis laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), kegiatan industri memberikan 11% PDB Indonesia pada tahun 2013 dan angka ini pun dianggap sebagai bagian penting untuk membuka investor dalam membangun industri besar di wilayah Indonesia.

Sumbangan yang besar dalam porsi ekonomi ini menciptakan atmosfer baru dalam

perkembangan kapitalisme di Indonesia. Kenaikan tingkat ekonomi yang signifikan menjadi dasar dari terbentuknya wacana ekonomi Indonesia dalam neo-liberalisme, kebebasan pasar dan akses yang terbuka bagi investor asing dan impor barang-barang di Indonesia. Bukan hanya barang-barang pokok yang diekspor bahkan barang-barang tersier dapat mudah ditemukan dan menciptakan satu ruang sosial yang baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kapitalisme di Indonesia telah berbentuk kultural dan menyebabkan adanya kecenderungan konsumerisme pada masyarakat. Hal ini sekilas memang tak dapat dielakkan, dan konsekuensi yang harus dihadapi adalah terpuruknya sistem ekologi di Indonesia.

Kapitalisme bukan hanya memberikan dampak ekonomi (*capitalism as economic structure*) melainkan juga sebagai bentuk transformasi sosial (*capitalism as social structure*) (Pohan, 2021). Kebutuhan masyarakat juga bertambah dengan kerasnya arus kapitalisme. Di Aceh, arus kapitalisme telah memakan berbagai hutan dan sungai, yang dampaknya pada pengrusakan dan pencemaran. Sebagai ongkos dari pencemaran tersebut, industri di Aceh memberikan pajak kepada negara, namun di sisi lain sektor pertanian dan perkebunan swadaya masyarakat semakin seragam atau malah justru hilang sama sekali. Sektor pertanian mulai menyusut di Aceh, dan bahkan hilang sama sekali di kabupaten-kabupaten terluar di Aceh seperti Aceh Singkil yang saat ini telah kehabisan lahan pertanian (padi). Masyarakat beralih untuk menanam kelapa sawit karena harga yang tinggi dan resiko yang rendah. Perkebunan sawit bukan hanya dibentuk oleh industri tapi juga dibentuk oleh perkebunan swadaya masyarakat.

Bentuk masyarakat dengan adanya industri kelapa sawit di Aceh juga bergeser, semakin maraknya konflik dan kehidupan masyarakat yang semakin individualis (Pohan, 2021). Konflik yang terjadi akibat adanya perebutan tanah dan pencaplokan lahan dan masyarakat kabupaten/daerah yang umumnya lebih individualis karena penghasilan yang mereka dapatkan dan jenis pekerjaan yang membentuk masyarakat menjadi soliter (White Jr, 1967). Di fase ini, pilihan untuk menjalani kehidupan adalah dengan bersifat konsumtif. Sifat konsumtif yang terjadi pada masyarakat Aceh pada umumnya bukanlah kecenderungan psikologis saja, melainkan dari aspek pendapatan, pekerjaan dan atmosfer perubahan pasar ke dalam bentuk yang terbuka.

#### **A. Konsumerisme dan Kapitalisme**

Konsumerisme pada umumnya hanya didefinisikan sebagai kecenderungan untuk

berfoya-foya, menghabiskan uang dan waktu dengan kegiatan yang sama-sakali tidak bermanfaat atau berlebihan. Namun, definisi konsumerisme bukan hanya itu saja melainkan sebagai nilai-nilai dan identitas seseorang yang dilekatkan pada sesuatu yang bersifat materi (kebendaan). Dalam hal ini, Jean Baudrillard memandang bahwa konsumerisme telah menjadi sebetulnya ritual yang menggiring penikmatnya untuk merasa tidak puas dengan keadaan dan batasan. Konsumerisme menciptakan ruang yang tidak terlihat untuk menjelaskan identitas yang mereka miliki, menjadi representasi dari budaya massa dan ideologi yang bersumber dari barang-barang, layanan dan simbol-simbol (Baudrillard, 1998).

Dalam diskursus filsafat, konsumerisme adalah ilusi yang membentuk replika dari kenyataan. Artinya, barang-barang yang dijadikan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran dan kepuasan tidak benar-benar substansial, tidak mencirikan kenyataan yang otentik yang pada juntrungnya memberikan definisi kabur antara yang asli dan yang palsu, meneguhkan imajinasi dan khayalan daripada melihat dunia dan kehidupan sebagai realitas.

Konsumerisme pada masyarakat Aceh saat ini mencapai satu bentuk wacana publik yang menyukai ilusi dan meneguhkan identitas melalui barang-barang yang dikonsumsi atau dikenakan, juga mempergunakan layanan untuk memberikan simbol kekuasaan dan kebebasan yang semu. Benda-benda elektronik seperti gawai, komputer jinjing, begitupula dengan alat transportasi seperti mobil dan sepeda motor mewah menjadi kebutuhan bagi masyarakat saat ini. Di sisi lain, terbentuknya layanan yang semakin membuat kehidupan masyarakat menjadi serban instan juga berpengaruh besar dalam membentuk masyarakat konsumtif, layanan berbentuk daring yang fokus melakukan transaksi jual-beli, layanan antar-jemput serta layanan lainnya memperteguh identitas konsumerisme di Aceh (Safrihsyah and Fitriani, 2014).

Konsumerisme pada dasarnya memiliki tiga tahapan; pertama, sebagai daya tawar atau nilai yang dipertukarkan dengan maksud memberi nilai instrinsik dari pertukaran barang, namun nilai instrinsik tersebut telah digantikan oleh keinginan bukan lagi kebutuhan. Hal ini memberikan kesan bahwa dengan sikap konsumtif untuk mencapai keuasaan dan keinginan dalam hidup. Kedua, nilai penggunaan yang mana barang atau layanan yang dimanfaatkan bukan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan sebagai aktualisasi diri di tengah kerumunan massa, menunjukkan diri lebih menonjol daripada yang lain. Ketiga menjadikan sikap



konsumtif menjadi nilai simbolik yang menjadi kekuatan untuk menjelaskan kelas sosial dengan simbol-simbol kecantikan/ketampanan, glamour dan prestise (Baudrillard, 1998). Hal ini diciptakan untuk memberikan kesan pemenuhan diri, menjebak masyarakat dalam upaya tak berujung, cepat bosan dan selalu tidak pernah puas dengan capaian dari barang dan layanan yang telah ia konsumsi.

Dengan demikian, konsumerisme menciptakan fokus masyarakat yang mengejar kehidupan instan dengan hasrat yang terbentuk dari keinginan yang tidak ada habisnya. Ketiga hal di atas menjadi landasan dalam hidup konsumtif dan hal ini membawa pada bentuk masyarakat modern. Konsumerisme selalu memiliki irisan dengan kapitalisme sebagai bentuk pada dasar dalam menentukan hasrat untuk memenuhi keinginan yang paling banal. Banalitas dari kehidupan modern yang terbentuk dari gelombang pasar yang dibawa oleh kapitalisme menghapus batas antara dunia nyata dan simulasi. Kapitalisme menciptakan dunia yang didominasi oleh simbol dan tanda, dapat berbentuk tren atau mode yang diperuntukkan sebagai simulasi dari identitas yang semu. Kapitalisme memang sebagai diskursus ekonomi, namun dalam diskursus sosial konsumerisme menjadi salah-satu perpanjangan tangan dari kapitalisme. Pembahasan mengenai konsumerisme dan kapitalisme menjadi topik bahasan dalam berbagai lintas disiplin ilmu sosial. Sebab, keduanya merupakan ciri dari terbentuknya era modern yang identik dengan pergerseran budaya, politik dan bahkan agama (Marcuse, 1964). Sisi lain dari konsumerisme dan kapitalisme adalah munculnya era krisis ekologi yang menjadi perhatian banyak pihak khususnya di Aceh.

Pada beberapa laman media menjelaskan bahwa saat ini Aceh telah berada di tahap perubahan iklim dalam penjelasan BMKG telah bertambahnya zona iklim di Aceh menjadi 15 (Republika, 2023). perubahan iklim ini juga diikuti dengan semakin meluasnya industrialisasi di Aceh. Di samping itu, Kepala Pusat Perubahan Iklim Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Suraiya Kamaruzzaman mengungkapkan bahwa perubahan iklim di Aceh telah secara konsisten terjadi sejak tahun 2017 yang merugikan petani lokal di Aceh, selama perubahan iklim gagal panen terus terjadi (Antaraneews, 2022). Industrialisasi di Aceh memang meningkatkan rasio ekonomi kepada warga yang menghabiskan pendapatannya untuk memenuhi hasrat konsumtif. Jika melihat sikap konsumtif tanpa melihat dampak industrialisasi yang dihasilkannya tentunya hal tersebut akan dianggap biasa saja. Namun, dengan adanya fakta

perubahan iklim akibat pencemaran yang timbul dari industrialisasi dan semakin banyak tumpukan sampah, petani dan biodiversitas tanah, sungai dan laut menjadi terancam (Fachruddin, 1996).

## **B. Gaya Hidup Konsumtif dan Dampak Ekologi**

Sebanyak 26.825 ribu hektar hutan di Aceh telah rusak oleh industrialisasi pada tahun 2017 sebagaimana laporan WALHI yang dilansir oleh Tempo (Tempo, 2019). Hal ini juga semakin bertambah setiap tahunnya, hutan lauser yang dilindungi pun telah mulai mengalami berbagai tekanan dari industrialisasi. Hal ini diikuti oleh kebijakan B30 dari presiden Joko Widodo dalam meningkatkan pasokan minyak sawit sebagai bahan bakar campuran biodisel dan solar. Sontak hal ini membuat masyarakat dan industri kelapa sawit semakin ekspansif, karena harga minyak sawit yang kian naik dan cenderung stabil. Pembalakan hutan pun terjadi, konflik agraria secara horizontal dan vertikal pun tidak dapat dielekan. Di samping itu, karena pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dari industrialisasi dan perkebunan, banyak golongan masyarakat Aceh yang beranjak menjadi kelas menengah.

Kelas menengah menjadi sasaran empuk dari kapitalisme pasar, pun kapitalisme-lah yang membentuk kelas menengah di Aceh. Hubungan simbiosis mutualisme ini menjadi kentara sekali dengan munculnya berbagai dampak sosial dalam masyarakat Aceh yang semakin konsumtif. Dalam historiografi Aceh, Aceh telah lama menghadapi konflik yang panjang semenjak konflik DI/TII sampai GAM-RI yang terjadi silam (Pohan, 2021). Pasca-tsunami membuka keran yang besar bagi kapitalisme dan hal ini berdampak pada munculnya kelas menengah yang bersifat amat konsumtif.

Pada satu pihak terjadi pembalakan hutan yang memunculkan Aceh sebagai wilayah industri, pada sisi lain menjelaskan bahwa kelas menengah yang tumbuh dari industrialisasi ini menjadi masyarakat yang konsumtif. Maraknya industrialisasi sayangnya berkebalikan dengan pertumbuhan petani tradisional yang menyediakan bahan-bahan makanan pokok. Alhasil, segala barang-barang pokok di Aceh hampir sebagian besar berasal dari luar daerah, khususnya daerah pinggiran dan pedalaman Provinsi Sumatra Utara. Hal ini menjadikan masyarakat Aceh menjadi konsumen dari barang-barang pokok, dan terlalu dalam tenggelam pada kemandirian akan impor produk dari luar.

Masyarakat Aceh kontemporer juga tak lepas dari teknologi, Marcuse (1964) menyebut

bahwa sikap konsumtif demikian digandrungi oleh masyarakat industri maju sehingga masyarakat yang demikian telah kehilangan daya untuk berfikir kritis dalam membentuk kesadaran untuk melawan hegemoni teknologi industri dan gaya hidup konsumtif yang dibawanya. Pemikiran Baudrillard dan Herbert Marcuse dapat dilihat dalam konteks masyarakat postmodern yang menginginkan benda-benda materi sebagai bentuk final dari kesenangan, pemenuhan hasrat dan hegemoni. Hal ini membentuk degradasi agama, yang mana sifat konsumerisme menimbulkan kedangkalan spiritual. Spiritualitas dalam Islam bukanlah hal yang hanya berupa simbol semata, melainkan sebuah bentuk nyata dalam kehidupan sosial. Konsumerisme memberikan janji-janji akan hidup tenang dan dihormati sembari melukai batin manusia. Dengan lemahnya tingkat spiritualitas tersebut, masyarakat Aceh yang konsumtif semakin abai dengan hal-hal genting seperti penumpukan sampah dan semakin tercemarnya tanah, sungai dan laut.

Untuk itu, penelusuran dalam hal spiritualitas dan ekologi digali dalam semangat Islam dengan landasan Alquran dan Hadis melalui pemahaman pada maqashid syariah. Fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) menjadi bagian penting dalam melihat wacana lingkungan dan spiritualitas (Pohan, 2022). Fiqh al-Bi'ah mensyaratkan bahwa untuk mencapai tingkat spiritualitas yang baik dengan hubungan manusia dan manusia (*hablum min an-nas*) dibutuhkan untuk menjaga lingkungan.

### **C. Fiqh Lingkungan Sebagai Alternatif**

Sangat sulit jika membayangkan bahwa masyarakat Aceh harus melawan industrialisasi atau merobohkan pabrik. Sebab industrialisasi sendiri menjadi bagian yang ikut menopang ekonomi masyarakat Aceh. Dalam isu-isu lingkungan, musuh terbesarnya memang bersumber dari pengelolaan industri yang tak dapat dikontrol. Akan tetapi, isu lingkungan atas tumpukan sampah di Aceh yang semakin besar bukan hanya dapat diselesaikan dengan melawan hegemoni industri, melainkan juga dapat diketengahi dengan adanya pemahaman spiritual dari masyarakat. Pun demikian, masalah penanggulangan sampah tidak hanya terletak dalam regulasi, meskipun regulasi dalam hal ini juga berperan besar dalam pengelolaan lingkungan. Penanggulangan sampah menjadi gerakan kolektif dari masyarakat beragama, khususnya di Aceh yang notabene masyarakat Islam yang juga dilindungi dengan legislasi Syariat Islam.

Fiqh al-Bi'ah (Fiqh lingkungan) adalah hal yang coba menjelaskan mengenai hubungan spiritulitas dengan ekologi (Al-Qardawi, 1421). Namun demikian, fiqh ekologi masih merupakan barang yang asing dalam kajian-kajian kebijakan, keagamaan dan sosial di Aceh. Tumpukan sampah, pembuangan limbah ke sungai, tanah dan laut apabila ditinjau dari pendekatan fiqh al-bi'ah dapat kita tarik kesimpulannya bahwa objek yang disasar fiqh al-bi'ah adalah masyarakat Islam. Di dalam Islam, istilah Taharah bukanlah hal yang asing kita temui dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer. Taharah adalah salah-satu pondasi untuk menjaga kebersihan, fiqh al-bi'ah mencoba memberikan penekanan yang lebih luas lagi, bahwa kebersihan/kesucian bukan hanya terletak pada tubuh individu melainkan dalam relasi manusia dengan alam dan relasi manusia dengan manusia. Selain taharah di dalam Islam juga terdapat fiqh nazafah (Mahrus, 2006). Dalam konsep kebersihan dalam Islam atau etika kebersihan dalam Islam mensyaratkan bahwa adanya upaya menahan diri dan kesadaran sebagai manusia.

Menahan diri adalah hal yang paling sulit dalam menghadapi tantangan dari konsumerisme. Konsumerisme pada dasarnya adalah kekotoran yang berwujud secara batin. Batin yang kotor adalah batin yang tidak pernah merasa puas dan selalu menginginkan lebih melampaui kebutuhannya sendiri dalam aspek-aspek material. Di dalam Islam terdapat sistem pembersihan batin yang disebut dengan 'zuhd'. Zuhd adalah melepaskan segala kekotoran konsumerisme yang dianggap akan semakin melemahkan jiwa dalam jebatan materi. Fiqh al-Bi'ah juga mengambil Zuhd sebagai paradigma dalam membersihkan hati manusia (Imamah, 2017).

Konsumerisme adalah penyebab dari menumpuknya sampah di Aceh. Minimnya kesadaran akan zuhd pada masyarakat beragama tanpa sadar menggeser cara berfikir masyarakat ke dalam pemborosan dan pencitraan diri melalui hasrat yang tidak terbatas. Penjabaran atas munculnya fiqh al-Bi'ah adalah hukum-hukum Islam yang bersifat 'amaliyah. Hukum 'amaliyah adalah perbuatan (amal) yang dilakukan oleh mukalaf. Pun proses lahirnya fiqh al-Bi'ah berdasarkan pada pelacakan pada nash-nash Alquran dan Hadis serta memiliki landasan metodologi pengambilan hukum 'amaliyah yang mu'tabar (direkognisi).

Fiqh al-bi'ah dalam tradisi pesantren di Indonesia masuk pada pembahasan bahstul masalah. Fiqh lingkungan di dalam hal ini menjadi hal yang dibicarakan dalam lingkungan

pesantren meskipun kuantitasnya masih sangat terbatas. Landasan fiqh lingkungan ini secara teologis dari semangat agama Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang tertuang dalam Surah al-Baqarah: 30. Bumi yang dikelola oleh manusia diperintahkan Allah untuk menjaganya dan jika terjadi kerusakan maka manusialah yang menjadi penyebab utamanya sebagaimana tertuang dalam surah ar-Rum ayat ke-41. Umat Islam diperintahkan untuk tidak membuat kerusakan (al-A'raf ayat ke 56) yang mana ditafsirkan secara lahiriah bahwa manusia tidak boleh membuat kecatatan ekologi. Di dalam Alquran disebut juga adanya kata 'fasad al-bi'ah' (kerusakan lingkungan) dalam berbagai surah karena ulah manusia yang picik, penuh hawa nafsu dan berlebih-lebihan yang tertulis dalam surah al-Isra' ayat 25-26, al-An'am ayat 141, al-A'raf ayat 3, al-Rahman ayat 7-9 dan al-Furqan ayat 67.

Konsumerisme memang menjadi perhatian besar dalam Alquran khususnya ketika sedang membahas kerusakan di bumi. Fiqh al-Bi'ah mencoba menjelaskan sistem kelola alam dengan upaya penjelasan spiritual dari manusia yang hidup berlebih-lebihan. Fiqh al-Bi'ah sebagai telah tertera di atas sudah memasuki pembahasan dari ulama-ulama di Indonesia, dalam hal ini sebagai contoh organisasi-organisasi Islam seperti NU misalnya dalam muktabamar ke-29 memberikan penekanan pada pencemaran lingkungan yang dianggap menimbulkan kemudhratan (dlarar) dan hal itu merupakan perbuatan haram serta masuk dalam perbuatan yang melanggar hukum yang dikenakan pasal jinayat (Ratnawati and dkk, 2016). Tak hanya itu, pada muktamar ke-33 dibentuk penegasan bahwa neoliberalisme hukumnya haram dan tidak dianjurkan bagi umat Islam untuk mendukungnya sama-sekali. Sebab, neoliberalisme menjadi akar dari industrialisasi dan menimbulkan banyak sekali pencemaran lingkungan.

Hal ini memang menjadi konsen bagi kalangan umat Islam, namun tetap saja belum ada penentangan yang signifikan pada umat islam terkait konsumerisme yang ditimbulkan dari industrialisasi dalam arus neoliberalisme. Padahal memang negara telah membentuk UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun masalah pencemaran lingkungan dan penumpukan sampah tetap saja bertambah dari tahun ke tahun.

Di Aceh, perda Syariat Islam juga telah mengeluarkan berbagai anjuran dan larangan dalam konteks penjagaan lingkungan, namun hal itu tidak membuahkan banyak hasil. Sebab, fiqh al-Bi'ah sebagai jalan alternatif spiritual belum dilaksanakan secara baik pada ranah

pendidikan dan dakwah agama Islam. Hal ini cukup sangat disayangkan melihat bahwa respon umat Islam Aceh mengenai penumpukan sampah tidak terlalu banyak dan tidak terlalu terdengar. Konsumerisme masih mengelayuti daerah Aceh, hal ini secara kultural menimbulkan kemerosotan masyarakat Aceh yang kolektif menjadi masyarakat yang individualis, juga memberikan dampak degradasi agama.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai variabel-variabel konsumerisme, sampah dan fiqh al-bi'ah maka dari pembahasan dan temuan diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Konsumerisme bersumber dari arus kapitalisme yang masuk ke Aceh pada era pasca-Tsunami. Sebelumnya masyarakat Aceh secara ekonomi dan sosial berciri tradisional dan kolektif. Namun dengan adanya industrialisasi besar-besaran memunculkan kelas menengah baru yang bersifat konsumtif dan individualis.
2. Sikap konsumtif pada masyarakat Aceh menimbulkan kedangkalan spiritual, sampah di Aceh yang semakin naik setiap tahun dalam persentasi kenaikan 30% setiap tahunnya dan akan bertambah banyak jika sedang dalam perayaan hari besar umat Islam menunjukkan semakin lemahnya tingkat spiritualitas Islam di Aceh dalam hal kesadaran lingkungan dan aktualisasi diri dari hal-hal yang tidak substansial seperti kebiasaan konsumtif.
3. Fiqh al-Bi'ah menjadi alternatif baru dalam meninjau tingkat spiritualitas umat Islam di Aceh dan sebagai cara untuk memahami konsep spiritualitas Islam yang menjaga lingkungan adalah salah-satu diantaranya. Fiqh al-Bi'ah telah muncul dalam pembicaraan ulama Islam kontemporer yang muncul dari semangat maqashid syariah, namun demikian gaungnya masih sangat minim karena rendahnya pengetahuan masyarakat akan pengelolaan lingkungan dan persepsi masyarakat bahwa kebersihan lingkungan adalah tugas instansi atau lembaga bukan tugas individu.

## **Daftar Pustaka**

Al-Qardawi, Y. (1421) *Riayatu al-Bi'ati fi Syari'at al-Islam*. Kairo: Daar al-Syuruq.

- Antaranews (2022) *Riset USK: Perubahan Iklim Sebabkan Petani di Aceh Besar Gagal Panen*. Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/3329370/riset-usk-perubahan-iklim-sebabkan-petani-di-aceh-besar-gagal-panen> (Accessed: 22 September 2023).
- Antaranews (2023) *Produksi Sampah di Aceh Selatan Meningkat Hingga 20 Persen Selama Bulan Ramadhan*. Available at: <https://aceh.antaraneews.com/berita/331620/produksi-sampah-di-aceh-selatan-meningkat-hingga-20-persen-selama-ramadhan> (Accessed: 21 September 2023).
- Arnez, M. (2014) 'Shifting Notions of Nature and Environmentalism in Indonesian Islam', *Environmental and Climate Change in South and Southeast Asia*. [Preprint].
- Badan Pusat Statistik Aceh (2020) *Jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh, 1998-2019*. Available at: <https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/20/243/jumlah-perusahaan-industri-besar-sedang-menurut-kabupaten-kota-se-provinsi-aceh-1998-2019.html> (Accessed: 22 September 2023).
- Badan Pusat Statistik Aceh (2022) *Jumlah Timbunan Sampah (m3/hari), 2020-2022*. Available at: <https://aceh.bps.go.id/indicator/155/188/1/jumlah-timbunan-sampah.html> (Accessed: 20 September 2023).
- Baudrillard, J. (1998) *Myths and Structures (Published in association with Theory, Culture & Society)*. Edisi Pertama. London: SAGE Publications Ltd.
- DLHK Banda Aceh (2020) *Volume Sampah di Bulan Ramadhan Meningkat, DLHK3 Tambah Shift Petugas*. Available at: <https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/2020/05/21/volume-sampah-di-bulan-ramadhan-meningkat-dlhk3-tambah-shift-petugas/> (Accessed: 21 September 2023).
- Efendi, S., & Taran, J. P. (2022). Pemberdayaan Potensi Warga Gampong Ujong Drien–Aceh Barat Melalui Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP). *Meuseuraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1-7.
- Fachruddin (1996) *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Foltz, R.C., Denny, F.M. and Baharuddin, A. (2003) *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. USA: Harvard University Press.
- Imamah, F.M. (2017) 'Menghadapi Kapitalisme Pendekatan Eco-Sufism dalam Gerakan Environmentalisme Islam Indonesia', *Kontemplasi*, Vol 05. No. 01.
- KOMPAS (2023) *Produksi Sampah di Banda Aceh Meningkat Kemampuan Mengolah Terbatas*. Available at: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/05/20/produksi-sampah-di-banda-aceh-meningkat-kemampuan-mengolah-terbatas> (Accessed: 21 September 2023).
- Mahrus, F. (2006) *Fiqh Lingkungan*. Jakarta: Conservation International Indonesia.
- Marcuse, H. (1964) *One Dimensional Man*. United States: Beacon Press.

- Northcott, M. (2013) *A Political Theology of Climate Change*. cambridge: Cambridge and Grand Rapids Michigan.
- Pohan, Z.R. (2021) *Sejarah Tanpa Manusia: Histriografi Singkel Abad VII-XXI*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Pohan, Z.R.H. (2022) 'Pohon Kurma Yang Menangis Dan Sesajen Di Pohon Beringin: Kritik Radikal Ekoteologi Islam Dan Agama Lokal Pada Antroposentrisme', *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains (Kiiis) Edisi 5* [Preprint].
- Ratnawati, T. and dkk (2016) *Etika Lingkungan*. Cet. 2, Ed. 1. Banten: Universitas terbuka Banten.
- Republika (2023) *Zona Musim di Aceh Naik dari Lima Menjadi 15*, BMKG: *Bukti Nyata Perubahan Iklim*. Available at: <https://news.republika.co.id/berita/rq10db463/zona-musim-di-aceh-naik-dari-lima-menjadi-15-bmkg-bukti-nyata-perubahan-iklim> (Accessed: 22 September 2023).
- Safrihsyah and Fitriani (2014) 'Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup', *Substantia*, Vol. 16, No. 1, pp. 61-77.
- Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukri, S., Kasih, D., Afriyani, M. P., Rinawati, R., Efendi, S., Saputra, E., & Era, N. (2023). Sosialisasi Dan Pemetaan Potensi Desa Sebagai Arah Pembangunan Yang Berkelanjutan. *JPMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 19-27.
- Tempo (2019) *Aceh Darurat Ekologi, 26 Ribu Hektare Hutan Hilang Setiap Tahun*. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/1048492/aceh-darurat-ekologi-26-ribu-hektare-hutan-hilang-setiap-tahun> (Accessed: 23 September 2023).
- Titscher, S. (2009) *Metode Analisis Teks & Wacana*. Translated by A. Syukur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- White Jr, L. (1967) 'The Historical Roots of Our Ecologic Crisis', *SCIENCE*, Vol. 155 No. 3767.
- Yafie, A. (2006) *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Edited by M. Wahid, H. Ali, and M. Ulpa. Jakarta: UFUK Press.
- Zed, M. (2004) *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.